KONDISI SOSIAL EKONOMI KELUARGA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA*)

*(Gunawan dan Sugiyanto**)*

ABSTRACT

Economic social condition of the family after employee terminate in textile industry was a research being studied in Bandung district, West Java and Semarang district, Central Java. The aim of this study was to explore the information about the characteristic of the problem and family potency as impact of the employee terminate as well as environmental potency in order to solve the problem. The result of data analysis and information which were collected including: (1) the families were wise enough in facing the economical problem. (2)Potency (industry in community) and natural resources that were available in community were still able to absorb and require the labour. (3) anti poverty program that was specifically intended to the family after employee terminate is not available. However, many programs that were aimed to poor family could be used for the family after employee terminate; these three aspects have been the basic of the setting of empowerment strategy for the family after employee terminate.

Keywords: *Termination of employment, Poverty Reduction Strategy*

ABSTRAK

Kondisi Sosial - ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja di Industri Tekstil merupakan penelitian kasus di Kabupaten Bandung - Jawa Barat dan Kabupaten Semarang - Propinsi Jawa Tengah yang bertujuan menggali informasi tentang karakteristik permasalahan dan potensi keluarga akibat PHK serta potensi lingkungan untuk pemecahan masalahnya. Analisis terhadap data dan informasi yang terhimpun dapat dikemukakan: (1) Keluarga cukup arif dalam menyikapi permasalahan yang sedang bergejolak ekonomi keluarga. (2) Potensi (Industri yang ada dan kemasyarakatan) dan Sumber daya alam yang tersedia masing memungkinkan untuk menampung dan membutuhkan tenaga. (3) Program anti kemiskinan yang secara khusus menunjuk pada keluarga Pasca PHK belum tampak jelas, tetapi mereka dapat dijadikan sasaran Program yang ditujukan kepada keluarga miskin yang memang sudah cukup banyak; Ketiga aspek tersebut telah mendasari tersusunnya Konsep Model: Strategi Pemberdayaan Keluarga Pasca PHK.

Kata-kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - strategi pengentasan Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

Selama kurun waktu kurang lebih satu dekade, Indonesia telah mengalami dua kali goncangan ekonomi, yakni Krisis Moneter pada akhir tahun 1977 dan Krisis Ekonomi Global pada tahun 2008. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kedua bentuk goncangan ekonomi tersebut telah berdampak pada

* Makalah ini merupakan sumari dari penelitian Dana Hibah Dikti pada tahun anggaran 2009

** **Gunawan** dan **Sugiyanto** adalah peneliti di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keasejahteraan Sosial, Kementerian Sosial.

merosotnya kondisi perekonomian keluarga dan memberikan kontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Kondisi ini tercermin dari data pada dekade 1976-1996 persentase penduduk miskin pernah mengalami penurunan yaitu dari 40,1% menjadi 11,3%; namun selama kurun waktu 2 tahun (1996-1998) pada masa krisis moneter, persentase penduduk miskin meningkat 24,29% atau 49,5 juta jiwa. Bahkan International Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3% (BPS, 1999). Jumlah keluarga miskin memang sudah banyak yang telah tertolong dengan berbagai program, namun secara absolut jumlah penduduk miskin masih tergolong tinggi. BPS (2008) menyebutkan, bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,58 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta (BPS 2008). Berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 2,21 juta orang.

Dalam kerangka mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran tersebut, pengembangan industri merupakan salah satu alternatif jawaban yang dijadikan pilihan. Di satu sisi industri banyak menyerap tenaga kerja dan di sisi lain industri ini telah mampu meningkatkan pendapatan negara yang cukup besar. Industri yang dijadikan prioritas nasional adalah industri padat karya yakni industri tekstil. Industri tekstil adalah industri yang berorientasi ekspor dan telah menyerap sekitar 1,8 juta pekerja (http:// mediadata.co.id Di pasar global, produk tekstil Indonesia masih cukup diperhitungkan. Tahun 2006, Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara pengekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) terbesar dunia. Indonesia menempati posisi keempat dalam impor TPT di Amerika dengan nilai US$ 3,9 miliar. Tahun 2007 kinerja ekspor diperkirakan mencapai US$ 9,9 miliar, peningkatan sekitar 9% dibanding tahun sebelumnya yang US$ 9,2 milyar. Bagaimanapun, industri TPT masih menjadi penyumbang devisa non-migas terbesar. Di pasar global produk tekstil Indonesia bersaing dengan Vietnam, Cina, dan India.,

Ketika tugas negara dalam mengatasi masalah kemiskinan belum sepenuhnya usai dan keluar dari gelombang krisis moneter, bangsa tersebut telah dihadapkan pada goncangan ekonomi dunia (Krisis Ekonomi Global). Krisis yang terjadi sejak oktober 2008 telah berdampak pada penurunan ekspor non migas khususnya ke Amerika dan Eropa. Bambang Prijombodo (2009) mengemukakan sejak Oktober 2008 terdapat indikasi sumber pertumbuhan ekonomi mulai melemah. Ekspor non migas pada oktober tahun 2008 turun 8,9 persen (m-t-m). Nilai ekspor tesebut menurun drastis mencapai lebih dari 50% pada Januari 2009 di angka US$5 miliar, padahal sebelum krisis terjadi di kuartal IV/2008 RI mampu membukukan rata-rata US$12 miliar perbulan (Rini Widuri Ragillia, 2009).

Secara ekonomi, menurunnya jumlah permintaan produk (deman) pengusaha akan mengurangi jumlah produksi (supply) yang akan berimbas pada pengurangan jumlah tenaga kerja, baik secara langsung dalam bentuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maupun merumahkan karyawan dengan konsekuensi dunia usaha membayar beberapa persen dari gaji karyawan yang dirumahkan. Konsekuensi logis dari pengurangan jumlah produk industri, tenaga kerja yang banyak dikurangi adalah tenaga kerja di level menengah ke bawah (bidang produksi). Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR tanggal 5 Februari, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengungkapkan, bahwa krisis ekonomi global bisa menimpa 200.000 pekerja, jika pertumbuhan ekonomi pada tahun ini hanya mencapai 4,5 persen, http://groups.yahoo.com/ group/nasionallist Berkaitan dengan informasi ini, Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Susetyo mengemukakan, bahwa

pengusaha terpaksa melakukan PHK bila permintaan terhadap produk mereka terus menurun. Kemungkinan besar yang bakal melakukan PHK adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki. Industri itu diperkirakan akan memangkas 10 persen dari 2,5 juta pekerjanya. (http:// www.matabumi.com).

Secara ekonomi[3], jelas bahwa PHK dapat menghentikan proses pemasukan *(income generating)* keluarga. Karyawan yang di PHK dan keluarganya pada kondisi ini sering disebut sebagai kemiskinan sementara. Menurut Darwin (2005), kemiskinan sementara (transient poverty) adalah kemiskinan yang dialami oleh orang (keluarga) yang sebelumnya tidak miskin, tetapi karena kondisi eksternal tertentu (perang, konflik horisontal masyarakat, bencana alam, kecelakaan, termasuk PHK dan sebagainya).

Permasalahan pertama kali dihadapi oleh keluarga yang terkena PHK adalah keluarga dihadapkan pada masalah ketidakpastian kapan pengangguranya berakhir. Realisasi dari perencanaan keluarga sosial keluarga (misalnya: untuk pendidikan anak, membayar angsuran/ kredit, bahkan tertutupnya akses keuangan, dan tidak jarang permasalahan ini akan memberikan tekanan psikologis *(stress)*. Sementara itu, kondisi ini belum didukung dengan jaminan sosial[4] yang memadai dan pekerja tidak mempunyai posisi tawar yang seimbang dengan pemilik lapangan kerja/modal. Apabila Kondisi keluarga seperti ini berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama, maka dikhawatirkan dapat menjadi kemiskinan kronis *(cronic poverty)*. Dampak Krisis tersebut tidak hanya sebatas pada permasalahan PHK tetapi mempunyai keterkaitan baik secara langsung terhadap orang orang yang menjadi tanggungan (keluarganya), maupun secara tidak langsung kepada lapangan kerja (sektor informal) dan jasa yang berfungsi sebagai support (pendukung) dalam pengembangan industri, seperti penjaja makanan jajanan, transportasi dan lain-lain. Jika kondisi ini tidak mendapatkan perhatian dan pelayanan secara memadai, dikhawatirkan dapat berdampak pada meningkatnya permasalahan sosial dan lebih kompleks[5]. Sebagai ilustrasi, Zubaedah Hanum dalam Media Indonesia 4 Februari 2009 menyebutkan bahwa Krisis keuangan global ini telah memicu timbulnya kerawanan sosial di beberapa negara seperti Yunani, Lhituania, dan Perancis.

---

[3] Dalam bahasa sehari-hari, istilah ekonomi mengandung banyak arti. Hal ini tentu akan berimplikasi terhadap pembahasan mengenai ekonomi itu sendiri. *Pertama* ada yang memaknai ekonomi sebagai "cara" melakukan sesuatu, seperti "ekonomi" atau "kalkulasi ekonomi" yang konotasinya adalah efisiensi. *Kedua*, ada yang memaknai ekonomi sebagai "aktifitas" yang biasanya ditunjukkan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. *Ketiga* ada yang melihat ekonomi sebagai "institusi" seperti dalam istilah ekonomi pasar atau ekonomi komando. Caporaso dan Levin (1993) dalam Delliarnov, 2009., Ekonomi Politik, Erlangga Jakarta.

[4] Memang tidak ada konsep baku tentang bagaimana sistem jaminan sosial di suatu Negara. Tetapi secara umum, seperti yang diusulkan oleh Bank Dunia dan ILO, system jaminan social haruslah meliputi 3 lapis (tier) jaminan sosial, yaitu: a) bantuan sosial (*social assistance*) yang berfungsi sebagai jarring pengaman (*safety net*), untuk semua warga Negara. Bantuan sosial murni berasal dari pengelolaan pendapatan Negara atau penerimaan pajak, diatur oleh Negara, utamanya berbentuk skema bantuan penghasilan terutama untuk lapis masyarakat yang paling membutuhkan; b) asuransi social (social assurance) yang berasal dari kontribusi dari warga, dan dapat dikelola oleh swasta; dan c) jaminan social sukarela (voluntary), biasanya dalam bentuk tunjangan pension yang diadakan oleh warga dengan insentif dari pemerintah. (Michael Raper,2008, Negara Tanpa Jaminan Sosial, Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia, TURC, Jakarta, hal 2)

[5] Dalam mengatasi masalah individual, disiplin psikologi sosial mengenal apa yang disebut dengan *coping techniques* (teknik-teknik menanggulangi masalah). David Mechanic menyebutnya istilah coping capabilities (kemampuan menanggulangi). Salah satu teknik penanggulangan itu adalah escape mechanism (mekanisme pelarian diri), orang menderita kemiskinan, menganggur, bodoh dan sebagainya akan melakukan berbagai mekanisme psikologis. Umpamanya perilakunya akan menjadi agresif, mudah tersinggung, suka menyerang otoritas, malas atau memperbanyak tidur. Semua itu sebenarnya merupakan mekanisme individu untuk melarikan diri dari persoalan. Rakhmat Jalaludin, 1999.,Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi, Remaja Rosda Kaya, Bandung

Dalam konteks pekerjaan sosial, keluarga adalah sebagai sebuah jaringan sosial alamiah fungsional dan sebagai sistem interaksional berdimensi resiprokalitas. Sebagai sebuah jaringan sosial alamiah yang fungsional, keluarga merupakan pusat jejaring yang di dalamnya mengandung potensi, kemampuan, dan kekuatan yang dapat digunakan sebagai sumber pemecahan masalah yang dihadapi. Pandangan ini juga menganggap, keluarga sebagai sumber keberdayaan dan sumber kekuatan bagi anggotanya. Sedangkan sebagai sistem interaksional berdimensi resiprokalitas memandang, bahwa keluarga terdiri dari berbagai subsistem berupa anggota keluarga, dan masing-masing anggota keluarga secara alamiah dan kultural telah diberikan fungsi dan peran masing-masing. Untuk menjalankan fungsi dan peran tersebut, setiap anggota keluarga harus saling berhubugan secara dinamis serta menata hubungan sosial dengan lingkungan eksternal. Masalah akan muncul, jika dalam anggota terjadi penyumbatan untuk menjalankan peran sebagai akibat kurang kuatnya hubungan resiprokalitas.

Sebagai sebuah lembaga, keluarga mempunyai fungsi yang cukup luas terutama sebagai fungsi pelayanan pada setiap anggota. Idealnya sebuah keluarga dapat menjalakan fungsinya (dalam istilah pekerjaan sosial disebut sebagai keberfungsian keluarga). Suharto dkk (2003) mendefinisikan keberfungsian sosial sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/ merespons kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan.

Dalam kerangka pelayanan yang komprehensif, persoalannya adalah bagaimana strategi untuk mengatasi permasalahan keluarga pasca PHK. Sebagai langkah awal, penelitian ini bertujuan untuk menggali data dan informasi yang berkaitan dengan: (1) Permasalahan dan Potensi keluarga pasca PHK; (2) Potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan keluarga pasca PHK; (3) Komitmen pemerintah daerah terhadap korban PHK. Ketiga aspek dimaksud akan dijadikan sebagai bahan acuan untuk penyusunan strategi pelayanan keluarga pasca PHK khususnya di lingkungan Industri tekstil.

Lokasi penelitian kasus ini ditentukan secara purposive dengan pertimbangan wilayah industri tekstil yang terjadi PHK karyawan secara massal yakni 2 wilayah yakni: Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Semarang - Provinsi Jawa Tengah. Kedua Propinsi tersebut merupakan sentra industri tekstil utama di Indonesia. Issue dan data, sumber informasi dan teknik penggalian data dapat dilihat pada matrik berikut:

Issue dan data	Sumber	Pengumpulan data
1. Permasalahan dan potensi keluarga PHK	▪ Keluarga ▪ Tokoh masyarakat dan aparat desa/kelurahan	▪ Wawancara ▪ FGD
2. Potensi lingkungan yang dapat dipergunakan untuk penanganan masalah	▪ Tokoh masyarakat dan Aparat desa/kelurahan ▪ Intansi sektoral ▪ Industri	▪ FGD ▪ Wawancara ▪ Wawancara
3. Komitmen Pemerintah Daerah dalam penanganan masalah pengangguran (PHK)	▪ Instansi sektoral ▪ Tokoh masyarakat dan Aparat desa kelurahan ▪ Industri	▪ Wawancara ▪ FGD ▪ Wawancara

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Hadari Nawawi (1983) analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam kerangka ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

II. HASIL PENELITIAN

Daerah yang dijadikan lokasi penelitian adalah (1) Kecamatan Dayeuhkolot -

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dan (2) Kecamatan Bawen - Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Secara prinsip, kedua daerah tersebut mempunyai karakteristik tidak jauh berbeda. Sebelum daerah tersebut ditentukan sebagai wilayah pengembangan Industri, daerah tersebut adalah potensial untuk pengembangan pertanian dan baik untuk pengembangan industri pertanian. Kondisi topografi tanah di dua wilayah ini sangat subur. Dalam kerangka industrialisasi, produk yang dihasilkan tidak hanya industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi siap pakai, tetapi juga dibarengi dengan pengembangan industri kecil dan agroindustri.

Dalam perkembangan industri, Dayeuhkolot termasuk sebagai wilayah yang telah cukup lama yakni sejak tahun 1947 di wilayah ini berdiri industri yang pertama kali, yaitu Pabrik Tekstil Patal Banjaran. Kehadiran pabrik tekstil ini, kemudian disusul pula munculnya beberapa pabrik lain, seperti Adetek, yang berdiri pada tahun 1972, sedangkan di kecamatan Bawen telah dibangun Industri tekstil berskala internasional pada tahun 1988 yakni KANINDOTEX (Kanigoro Indonesia Tekstil) dan telah berganti nama PT APAC Inti Corpora (AIC) pada tahun 1995.

Di era krisis ekonomi global, beberapa industri tekstil yang berada di dua daerah tersebut telah mengalami kelesuan atau cenderung kolaps, bahkan beberapa industri besar telah mengalami gulung tikar atau pailit. Karyawan pada Industri yang telah dinyatakan Pailit dan masih aktif adalah tenaga keamanan yang bertugas menjaga aset yang dimiliki perusahaan. Industri yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah industri yang mengalami penurunan produksi tetapi masih aktif berproduksi. Dalam penelitian ini industri yang dikunjungi adalah Industri Adeteks dan APAC INTI CORPORA (AIC). Sebagai ilustrasi, Jumlah tenaga kerja secara keseluruhan sebelum terjadi PHK sebanyak 10529 orang. Menurut Manager APAC Inti jumlah tenaga kerja yang ideal adalah 8000 orang. Jumlah tenaga kerja yang masih kerja sebanyak 7068 orang sedangkan yang telah di PHK sebanyak 3461, jumlah tenaga kerja yang rawan sebanyak 250 orang. Rata-rata usia tenaga kerja yang di PHK 35tahun.

Pokok bahasan penelitian ini secara khusus lebih terfokus pada 3 aspek yakni: (1) Permasalahan dan potensi keluarga; (2) Potensi lingkungan yang dapat dipergunakan untuk penanganan masalah sosial tersebut; (3) Komitmen Pemerintah Daerah (Kota/ Kabupaten) dalam penanganan masalah sosial -ekonomi keluarga pasca PHK. Berdasar data dan informasi yang terhimpun dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Permasalahan dan potensi keluarga

Aspek yang dijadikan sebagai pokok bahasan tentang Permasalahan dan Potensi Keluarga Pasca PHK pada dasarnya mempunyai keterkaitan erat dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi/ merespons kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan. Berdasar data dan informasi yang terhimpun dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1.1. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar

Kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar berkaitan erat dengan usia, pendidikan, keterampilan, dan relasi sosial. Aspek-aspek dimaksud umumnya telah dijadikan sebagai tuntutan managemen khususnya untuk pekerjaan di sektor formal. Berdasar data hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

Keluarga yang dapat dijumpai dalam penelitian ini umumnya adalah keluarga muda. Dari aspek usia, umumnya anggota keluarga yang terkena PHK berusia 30 tahun ke atas. Dari 60 orang yang dijumpai dalam penelitian

ini hanya 16 orang (26,7%) yang berusia dibawah 30 tahun. Usia antara 30-40 tahun sebanyak 31 orang (51,7%) dan yang usia 40 tahun lebih sebanyak 13 orang atau 21,6%. Dari aspek pendidikan umumnya adalah pendidikan menengah ke bawah, kondisi ini tercermin dari 14 orang berpendidikan SD, 25 orang berpendidikan SLTP dan SLTA/sederajat sebanyak 19 orang, sedangkan yang berpendidikan S1 hanya 1 orang. Kondisi ini berkaitan dengan pekerjaan yang lebih banyak menggantungkan fisik.Hal tersebut tercermin dari sebagian besar (73,3%) responden adalah operator spin, 7 orang teknisi (11,7%) dan sisanya adalah cleaning service, security (keamanan), Supir, dan Dari 60 orang hanya sebagian kecil (5,0%) yang berkaitan dengan pengendalian/managemen (2 orang kepala bagian serta 1 orang supervisor).

Ditinjau dari lamanya keluarga berdomisili, pada umumnya keluarga yang terkena PHK telah berdomisili lebih dari 5 tahun. Sebagian besar adalah penduduk asli dalam satu kabupaten. Mereka adalah orang yang sangat mengenal lingkungan sosial, baik lingkungan sosial di daerah tempat tinggal maupun lingkungan tempat kerja. Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan. karena mereka tinggal di satu daerah yang saling berdekatan dengan keluarga besar (kerabat). Di sisi lain selama tinggal di daerah tersebut sudah cukup banyak hubungan dengan komunitas disekitar tempat tinggal mereka yang dapat dijaring. Kedekatan hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan dengan tetangga tersebut tercermin dari perhatian tokoh masyarakat yang tergerak hatinya untuk ikut mengatasi masalah PHK. Sebagai ilustrasi tindakan Pak Suparjan (sebagai Guru SMP dan tokoh masyarakat Desa Harjosari) yang menghubungi relasi di Industri Kayu Lapis di Kabupaten Temanggung setelah mengikuti FGD. Hasilnya, ada kesediaan Industri tersebut untuk merekrut beberapa orang PHK sesuai dengan kriteria yang diajukan.

Uraian di atas menunjukan bahwa keluarga yang terkena PHK mempunyai potensi besar untuk mengakses pekerjaan terutama pekerjaan yang lebih mengandalkan fisik dengan kompensasi rendah. Kebanyakan mereka telah dapat memperoleh pekerjaan kembali atau mempunyai kegiatan usaha dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, walaupun pekerjaan yang dilaksanakan ada unsur keterpaksaan / desakan ekonomi. Jenis pekerjaan yang dijadikan pilihan keluarga ini umumnya adalah jenis pekerjaan yang relatif cepat didapat, seperti kerja serabutan atau glidig (jawa), yakni jasa fisik (misalnya membersihkan halaman, menggarap sawah, buruh bangunan) yang dibutuhkan baik secara individu maupun kelembagaan. Pada prinsipnya pekerjaan tersebut dianggap halal dan dapat secara cepat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan

Tabel 1
Perbedaan Jenis pekerjaan Keluarga

No	**Sebelum PHK**	F	%	**Sesudah PHK**	F	%
1	Operator	45	73.3	Kerja serabutan/glidig	17	28,3
2	Teknisi	7	11.7	Dagang/wirausaha	9	15.0
3	Pemimpin bagian	2	3.3	Penjahit	2	3.3
4	cleaning service	2	3.3	Sales marketing	1	1.7
5	Security	1	1.7	Beternak	2	3.3
6	Supir	2	3.3	Guru agama (mengaji)	1	1.7
7	Supervisor	1	1.7	Ikut orgasnisasi SPSI	1	1.7
8				Tidak bekerja	27	45.0
	Total	**60**	**100.0**	**Total**	**60**	**100.0**

Sumber: data primer

dasar/pokok. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan pekerjaan untuk menopang kehidupan keluarga yang dilakukan sebelum dan sesudah PHK terjadi.

Dari angka pada tabel tersebut terlihat bahwa keluarga yang belum mendapat pekerjaan cukup banyak (45,0%). Dalam kerangka mengatasi permasalahan dihadapi, mereka lebih banyak menggunakan pendekatan spiritual[6]. Mereka masih mengharapkan kondisi perekonomian segera pulih dan dapat bekerja kembali di sektor formal. Bagi keluarga yang sudah bekerja, jenis pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan dengan upah yang tidak menentu, artinya mereka tergantung pada orang atau lembaga yang memberikan pekerjaan dan berada dalam posisi tawar yang lemah.

Ditinjau dari penghasilan yang di dapat atas hasil pekerjaan sesudah PHK, kondisi mereka masih relatif sangat jauh dari harapan. Sementara itu jika dibandingkan penghasilan yang diperoleh sesuai Upah Minimal Kabupaten (UMK)[7], maka penghasilan yang mereka peroleh masih banyak yang masih jauh di bawah UMK. Jumlah keluarga yang memperoleh pendapatan dibawah UMK mencapai lebih dari 30%. Secara normatif, gaji tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti ketika dalam kondisi normal, terlebih lagi jika yang terkena PHK adalah keluarga yang suami dan istri bekerja dalam satu perusahaan. Sebagai ilustrasi keluarga Margo (suami istri) terkena PHK mengatakan: "kados pundi pak, kolo suami istri nyambut damel kemawon tasih pas-pasan, punopo malih kulo lan rencang istri sak meniko sampun dipun PHK, lajeng kangge nyekapi kebetahan keluargo tasih kirang punopo malih tasih dibebani angsuran kredit koperasi lan biaya sekolah lare ingkang kedah dibayar lan mboten saget dipun semayani..". dalam artian harfiah dapat diterjemahkan: Bagaimana pak, pada saat suami istri bekerja saja masih pas-pasan, apalagi saya dan istri sekarang sudah di PHK, untuk mencukupi kebutuhan keluarga saja masih kurang, apalagi kita .masih dibebani angsuran kredit koperasi dan biaya sekolah yang harus segera dibayar dan tidak dapat ditangguhkan.

Untuk sementara waktu, Pak Margo sudah dapat pekerjaan sebagai marketing Dealer Yamaha. Penghasilannya tergantung dari persentase produk yang dapat terjual melalui Pak Margo. Sedangkan untuk menunjang kegiatannya Pak Margo hanya mendapat uang bensin Rp.10.000,- . Ilustrasi dari penghasilan keluarga pak Margo tersebut, juga dialami oleh beberapa keluarga yang suami istri terkena PHK.

Khususnya bagi keluarga yang telah mendapat uang pesangon (walaupun dibayar secara bertahap setiap bulan tergantung masa kerja), goncangan ekonomi keluarga belum begitu terasa. Namun bagi yang belum mendapat uang pesangon, goncangan ekonomi tersebut sudah mulai dirasakan. Kondisi keluarga yang belum mendapat uang pesangon tersebut diperparah dengan cicilan utang Bank karena kredit motor, barang kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat ditunda pembayarannya. Penghasilan yang diperoleh keluarga pasca PHK dapat dilihat pada tabel berikut.

---

[6] Salah satu cara yang bisa dipergunakan untuk menanggulangi masalah individual adalah pendekatan religius. Berikut ini hanya contoh belaka Ketika orang dipecat dari pekerjaannya, kita katakan kepadanya "Anda sedang diuji oleh Tuhan. Hampir semua orang saleh pernah diuji Allah lewat pelbagai musibah. Dan semua ujian ini untuk mengetahui iman Anda. Makin berat ujian yang Anda terima makin tinggi iman Anda. Rakhmat Jalaludin, 1999.,Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi, Remaja Rosda Kaya, Bandung

[7] UMK di Bandung pada tahun 2008 sebesar Rp. 950.0000, sedangkan UMK tahun 2009 ada kenaikan sebesar 1.050.000,. UMK di Kabupaten Semarang pada pada tahun 2008 sebesar Rp. 672,000,- tahun 2009 ada kenaikan menjadi Rp.759.000,-. Namun realisasi dari UMK yang dipergunakan baik di Bandung maupun di Semarang masih mempergunakan UMK tahun 2008

Tabel 2.
Penghasilan keluarga pasca PHK

No	Penghasilan perbulan	f	%
1	< Rp. 200.000	1	1,7
2	Rp. 200.001 - Rp. 400.000	15	25,0
3	Rp. 400.001 - Rp. 600.000	3	5,0
4	p. 600.001 - Rp. 800.000	3	5,0
5	Rp. 800.001 - Rp. 1.000.000	3	5,0
6	> Rp. 1.000.000	2	3,3
7	tak menentu	8	13,3
8	tidak ada	25	47,7

Jika dicermati, kondisi keluarga pasca PHK merupakan keluarga rentan[8] yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Keterbatasan penghasilan ini akan berdampak pada pengurangan pemenuhan kebutuhan untuk makan, pendidikan anak, dan membuyarkan rencana keluarga. Kemampuan mereka untuk keluar dari permasalahan relatif sulit. Pada kasus ini, pendapatan (hasil), keterampilan dan pendidikan yang rendah merupakan suatu mata rantai. Keduanya saling berkaitan dan saling berpengaruh.

Dalam kerangka alih profesi, umumnya mereka masih mengantungkan (berharap) agar uang pesangon dapat segera dibayarkan, karena dana tersebut akan dipergunakan sebagai modal dan membayar (menutup kredit) agar jeratan bunga tidak terlalu besar. Sebagian besar (68,3%) belum menerima jaminan asuransi, sedangkan yang telah mendapat jaminan baru 19 orang (31,7%) dari Asuransi Tenaga Kerja[9] dan pesangon (kompensasi) dari perusahaan. Bagi yang telah mendapatkan uang pesangon dan Astek agak sedikit longgar. Informasi ini mengindikasikan bahwa mereka adalah orang yang sulit untuk keluar dari masalah. Uang pesangon yang dibayarkan secara berkala tiap bulan cenderung dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif untuk biaya hidup sehari-hari.

Secara ekonomi, perencanaan keluarga menjadi berantakan. Kondisi ini tercermin dari biaya angsuran (kredit) yang terputus, sehingga barang rumah tangga yang dapat dijadikan sebagai aset harus dijual karena tidak mampu membayar angsuran. Keinginan untuk berusaha (buka warung, makanan jajanan) akan tertunda dan atau bahkan diurungkan karena dana yang diharapkan turun secara berkala.

Salah satu fungsi dari keluarga yang berkaitan erat dengan sosial psikologis adalah fungsi ekonomi. Ketidak-berfungsian keluarga bidang ekonomi merupakan faktor yang dominan berpengaruh dan tidak menguntungkan terhadap kesejahteraan keluarga khususnya perkembangan hubungan sosial dalam rumah tangga. Seorang suami yang seharusnya

[8] Konsep keluarga rentan (*vulnerable people*) pada dasarnya mengacu pada konsep risiko, yaitu risiko seseorang yang saat ini tidak miskin dan di kemudian hari akan jatuh menjadi (menurunkan derajat sosial ekonomi) Faktor-faktor risiko yang mempengaruhi seseorang menjadi miskin antara lain (1) hilang atau berkurangnya penghasilan atau pendapatan, baik karena PHK, rugi atau pailit usahanya, jatuh sakit berat; (2) hilang atau berkurangnya aset yang dimiliki akibat bencana alam maupun bencana sosial; (3) meningkatnya pengeluaran akibat tingginya biaya kesehatan, kecelakaan. Jika seseorang tidak lagi memiliki pendapatan maka dalam jangka waktu tertentu besar kemungkinan akan jatuh miskin, tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pekerja yang di-PHK dalam jangka waktu tertentu tidak lagi memiliki penghasilan akan berisiko menjadi miskin.

[9] Kepala bidang Pemasaran PT Jamsostek Cabang Ungaran Sudiono, mengatakan pada Januari 2009 PT Apac Inti Corpora (AIC) melaporkan ke Jamsostek sebanyak 3.023 karyawan yang terkena PHK. Sementara Februari dilaporkan sebanyak 325 karyawan yang di-PHK. "Tiap hari rata-rata 200-250 orang yang mengambil dana jaminan hari tua. Dana yang dikeluarkan setiap harinya mencapai Rp 500 juta karena per orang rata-rata menerima Rp 2,5 juta. Jamsostek sudah membayarkan jaminan hari tua kepada 1.895 orang dengan nominal uang sebesar Rp 4,8 miliar," ungkapnya, Jumat (6/3). Menurut Sudiono, rata-rata karyawan PT AIC yang terkena PHK memiliki masa kerja diatas 5 tahun. Sehingga mereka sudah bisa mengambil dana jaminan hari tua. Jaminan hari tua mulai dibayarkan Februari kemarin karena masa tunggu pengambilan JHT satu bulan setelah terkena PHK.Masa tunggu pengambilan JHT tersebut, jelas Sudiono, diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No 01/2009 perubahan atas PP No 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sebelum ada perubahan PP, masa tunggu pengambilan JHT adalah enam bulan setelah PHK.

menjadi pelindung bagi istri dan anaknya seringkali bertindak kurang arif dalam menyikapi persoalan, bahkan seringkali ada kecenderungan bahwa perilakunya mengarah pada tindakan kekerasan atau yang sering disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut pandangan Tokoh masyarakat pada saat FGD mengemukakan

"Korban PHK ada yang frustasi, bahkan bagi tenaga kerja wanita akibat PHK bisa menjadi salah satu jenis permasalahan sosial yang disebut menjadi wanita rawan sosial ekonomi, stres, bahkan ada yang melacurkan diri. Hal tersebut diketahui dari laporan warga bahwa ada warganya yang menderita penyakit HIV. Penderita tersebut diduga adanya warga eks korban PHK yang mencari uang untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan cara melacurkan diri. Selain itu sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena mereka tidak siap atau tidak punya keahlian yang memadai untuk mencari nafkah".

1.2 Kemampuan Keluarga dalam Pelaksanaan Peran Sosial

Kemampuan peran sosial yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat dari frekuensi keikutsertaan keluarga dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakan di lingkungannya. Dari data yang terhimpun dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1.2.1. Keterlibatan dalam kegiatan pertemuan rapat RT/RW.

Sebagian besar keluarga (74,4%) pernah mengikuti kegiatan pertemuan RT/RW sedangkan sisanya (26,6%) menyatakan tidak pernah, namun yang selalu mengikuti/hadir dalam setiap pertemuan RT/RW (dari 74,4%) hanya sebesar 21,7%. Kehadiran keluarga dalam pertemuan RT/RW ini juga tercermin dari sebagian besar (65,0%) keluarga yang tidak pernah mengikuti arisan yang diselenggarakan RT/RW. Dalam kehidpan spiritual, sebagian besar (81,7%) keluarga yang dijumpai masih aktif mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian, persekutuan doa, dan ikut arisan di dalam perkumpulan tersebut. Pelaksanaan peran sosial kemasyarakatan ini juga tercermin dari keikutsertaan mereka dalam kepanitiaan kegiatan sosial, gotong royong, perayaan hari besar nasional, pertandingan olah raga dan berbincang dengan tetangga. Jika ditelusuri, orang yang selalu hadir dalam pertemuan tersebut adalah aktivis RT/RW (Ketua RT dan seksi). Mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan aktivitas tersebut.

1.3 Strategi Keluarga dalam menghadapi goncangan dan tekanan

Dalam tata kehidupan dan penghidupan masyarakat, setiap keluarga tidak akan terlepas dari permasalahan (goncangan dan tekanan). Permasalahan yang dimaksud di sini dapat berupa permasalahan ekonmomi maupun sosial. Setiap keluarga pada umumya telah mempunyai pengalaman hidup untuk survive dalam berbagai kondisi. Dalam istilah pekerjaan sosial sering disebut sebagai *Coping strategy.* Setiap keluarga sebagai suatu lembaga sosial terkecil pasti mempunyai manajer dengan seperangkat aset yang ada di seputar diri dan lingkungannya[10].

Dalam rangka menanggapi goncangan dan tekanan ekonomi, pada dasarnya mereka penuh optimis dan mempunyai strategi yang cukup handal. Strategi dalam menghadapi permasalahan keluarga, merupakan salah satu indikator

[10] Strategi dalam menghadapi goncangan dan tekanan ekonomi yang dilakukan oleh keluarga dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yakni strategi yang bersifat pasif dan strategi yang bersifat aktif. Strategi yang bersifat pasif tercermin dari penekanan/pengetatan pengeluaran biaya hidup, yaitu mengurangi pengeluaran kebutuhan hidup keluarga (misalnya pengeluaran biaya untuk sandang, pangan, biaya sosial, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya). Sedangkan strategi yang bersifat aktif adalah optialisasi potensi diri dan lingkungannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

variabel potensi mereka. Dalam konteks ini mereka tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang statis, tetapi mempunyai dinamika sesuai dengan tantangan dan perubahan sosial. Umumnya dinamika dan mobilitas mereka dalam pekerjaan relatif tinggi. Kondisi ini tercermin dari 66,7% keluarga mengatasi permasalahan tersebut antara lain dalam bentuk berdoa dan dan terus berusaha untuk mencari pekerjaan. Perhatian mereka lebih terfokus kepada kegiatan yang berhubungan dengan pencarian nafkah

Tingginya dinamika sosial keluarga ini juga tercermin dalam pemanfaatan jaringan sosial yang mereka miliki. Jaringan yang dimaksud adalah relasi sosial mereka, baik secara informal maupun formal dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan. Pemanfaatan jaringan ini terlihat jelas dalam mengatasi masalah ekonomi dengan pinjam uang kepada orang terdekat (terutama pada saudara, tetangga, teman kerja), hutang di warung terdekat, bahkan ada yang pinjam uang ke rentenir, sedangkan yang berusaha mencari pinjaman di bank hanya 1,7%. Kondisi ini menunjukkan, bahwa di antara mereka mempunyai solidaritas yang kuat dan saling percaya. Tampaknya teman merupakan tumpuan untuk memperoleh pertolongan dan sebagai tempat pertama yang akan dituju apabila mereka mengalami masalah. Relasi sosial mereka tidak hanya sebatas di bidang ekonomi, tetapi mencakup bidang-bidang yang lain, misalnya dalam peningkatan mental spiritual. Kegiatan ini merupakan strategi yang bersifat aktif untuk memperoleh dukungan emosional.

Konsekuensi Logis dari perolehan hasil yang sangat minim tersebut akan memaksa keluarga untuk melakukan pengetatan pengunaan uang terutama untuk untuk kebutuhan hidup. Satu hal yang lebih memprihatinkan adalah, strategi tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas anak sebagai sumber daya manusia masa depan. Strategi pengetatan dimaksud antara lain antara lain:

1.1.1 Pengetatan biaya kebutuhan makan

Dalam kerangka pengelolaan keuangan, sebagian besar dari keluarga yang dijumpai dalam penelitian ini pernah bahkan sering kali melakukan pengetatan bahkan pengurangan biaya makan. Penurunan biaya makan baik kualitas maupun kuantitas ini dapat berpengaruh buruk terhadap tingkat kesehatan anggota keluarga khususnya anak yang sedang dalam kondisi tumbuh dan berkembang. Secara kuantitas, pengetatan makan dilihat dari segi frekuensi makan perhari (umumnya orang makan sehari 3 kali) tetapi karena kondisi ekonomi maka ada kemungkinan makan sehari 2 kali. Sedangkan dari segi kualitas, adalah pengurangan atau penurunan menu makan yang biasanya dilakukan adalah mengurangi jenis lauk pauk. Dari data yang terhimpun dalam pengetatan biaya makan ini dapat dilihat dari penelitian ini umumnya keluarga akan melakukan pengetatan biaya makan sedangkan yang tidak pernah melakukan biaya pengetatan hanya ada 2 keluarga.

1.1.2 Pengetatan biaya pendidikan anak

Anak sebagai generasi penerus dan pemilik masa depan yang perlu disiapkan sebaik mungkin. Perhatian terhadap pendidikan dan pengembangan anak pada dasarnya telah menjadi komitmen pemerintah terutama untuk membebaskan biaya pendidikan bagi anak khhususnya untuk pendidikan di tingkat dasar 9 tahun. Sedangkan untuk keperluan sekolah anak (iuran wajib sekolah, seragam, transportasi, dan buku) masih menjadi beban keluarga. Dalam kerangka penyiapan anak tersebut peran keluarga berpengaruh besar. Namun dalam kondisi perekonomian keluarga yang sedang mengalami krisis ada beberapa aspek kebutuhan anak dan kemudahan anak yang kurang dan atau tidak dapat dipenuhi oleh orang tua. Dari data yang terhimpun, sebagian besar (68,3%) keluarga telah melakukan

pengetatan biaya untuk pendidikan anak, sedangkan yang tidak pernah melakukan pengetatan ada 19 orang (31,7%). Pengetatan biaya yang berkaitan dengan biaya pendidikan ini juga dilakukan oleh 87,8% keluarga yang mengurangi biaya transportasi anak. Pengetatan biaya transportasi pendidikan ini tentunya dapat berpengaruh pada kemampuan fisik anak dalam proses belajar mengajar, karena anak sudah cukup lelah setelah menempuh perjalanan pergi-pulang sekolah,

Sadar ataupun tidak, seorang anak pasti akan tahu jika orang tuanya terlambat atau bahkan tidak mampu bayar iuran sekolah, uang transport dikurangi, uang jajan ditiadakan. Secara psikologis, anak mempunyai rasa percaya diri dan bangga atas dirinya jika seorang anak mempunyai kondisi dan perlakuan yang sama dengan anak lain terutama anak yang berada di lingkungannya. Bagi anak dari keluarga yang sedang mengalami krisis ekonomi, seringkali terjadi hambatan sosial psikologis untuk peningkatan prestasi belajar, bahkan dapat berakibat pada terputusnya pendidikan anak *(dropout)*.

Strategi dalam menghadapi goncangan dan tekanan ekonomi yang ditentukan oleh keluarga lebih banyak kerugiannya (beresiko) dari pada keuntungan. Strategi pinjam uang (terlebih lagi hutang pada rentener) akan beresiko tinggi bagi penurunan kondisi perekonomian keluarga. Pengetatan biaya makan dan biaya kebutuhan pendidikan anak, dapat berdampak pada prestasi belajar anak. Penekanan biaya makan dan transportasi pendidikan anak dapat menurunkan kualitas fisik dan psikologis anak yang sedang tumbuh dan berkembang serta dapat mengurangi konsentrasi anak dalam proses belajar anak dan semangat belajar anak di rumah. Hal yang lebih dikhawatirkan dari menurunnya kualitas fisik anak adalah jika anak mengalami sakit justru pengeluaran biaya untuk kesehatan lebih besar. Sadar ataupun tidak, bahaya dari penentuan strategi ini adalah terjadinya ***Jebakan Kemiskinan Keluarga***[11].

2. Potensi yang dapat dipergunakan untuk penanganan masalah PHK

2.1. Industri Garment

Ketika terjadi krisis ekonomi global, industri yang mengalami goncangan paling berat adalah industri tekstil terutama untuk pangsa pasar di Amerika dan Eropa. Berbeda dengan Industri Produk Tekstil (IPT) seperti perusahaan di bidang Garment yang mempunyai pangsa pasar di kawasan Timur. Pada saat ini IPT justru mengalami peningkatan permintaan hasil produksi yang cukup besar, sehingga perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dalam kerangka mengatasi masalah PHK di Industri Tekstil, permintaan tenaga kerja di IPT merupakan peluang besar untuk penyaluran tenaga kerja, karena Garment adalah industri padat karya. Walaupun pekerjaan di Industri Tekstil dengan pekerjaan di IPT membutuhkan keterampilan yang berbeda, namun untuk alih profesi pada pekerjaan tersebut tidak sulit. Pejabat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, Sri Wityastutiningsih, mengemukakan:

mereka adalah orang yang tekun dan terbiasa dengan pekerjaan yang membutuhkan

[11] Harry Seldadyo Gunardi, (1996: 73) Proses marginalisasi ekonomi rakyat dari *circel* pengambilan kebijakan dan kehidupan ekonomi telah melahirkan pelbagai bentuk kepincangan yang terlihat dalam tiga bentuk, yakni *(1) input yang diakses, (2) output yang dihasilkan, dan (3) kompensasi yang diterima.* Jalaludin Rakhmat (1999) dalam *Rekayasa Sosial, Reformasi atau revolusi* mangemukakan, bahwa produktivitas yang rendah menimbulkan pendapatan yang rendah, pendapatan yang rendah menyebabkan pendidikan yang rendah, Pendidikan yang rendah mengakibatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Kualitas SDM yang rendah menyebabkan produktivitas yang rendah; dan terus begitu. Rangkaian tersebut sering disebut sebagai *vicious circle* atau "lingkaran setan" kemiskinan.

ketelitian, sehingga hanya membutuhkan sedikit sentuhan keterampilan di bidang garment dan kami punya program tersebut, namun yang menjadi persoalan adalah banyak tenaga kerja yang di PHK yang tidak bisa alih profesi karena kriteria usia yang dibutuhkan perusahaan garment adalah tenaga usia muda.

Terkait dengan pelatihan tersebut, Industri yang relatif besar yang tergolong maju umumnya telah dilengkapi dengan fasilitas untuk pengembangan sumber daya manusia. PT AIC mempunyai tempat pelatihan yang diberi nama Griya Pelatihan APAC (GRIPAC). Materi pelatihan yang disediakan di GRIPAC antara lain Vocational Training dan General service. Pelatihan Vocational Training terdiri dari Tekxtile Product Knoledge, Spining Operation Training, Weaving Operation Training, Garment Training . General service terdiri dari pelatihan Achievement Motivation Training, Wining Team Building, leadership in Effective Team, Supervisor Management, Training of Trainer, Computer Training, Assessment Centre, Fire and Safety, Export Import Training. Pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia yang dikembangkan GRIPAC tersebut telah dipercaya oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sekolah-sekolah kejuruan. Dalam kerangka pemberdayaan, beberapa jenis pelatihan tersebut telah ditawarkan AIC kepada karyawan yang di PHK, namun penawaran perusahaan mendapat tanggapan (tidak ada yang berminat untuk mengikuti pelatihan), karena mereka mempunyai pandangan tidak secara langsung menghasilkan uang, sedangkan kebutuhan yang harus segera dipenuhi adalah pekerjaan.

2.2. Kelembagaan di Lingkungan Industri

Di dalam Industri telah dibentuk beberapa lembaga yang mengikat anggotanya (antar karyawan, baik secara vertikal maupun horizontal). Lembaga dimaksud adalah Koperasi, Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Ikatan keluarga karyawan, sebagai contoh Ikatan Keluarga AIC. Tujuan pembentukan Lembaga tersebut adalah untuk peningkatan jaringan sosial. Peran lembaga tidak hanya sebatas pada penyelesaian masalah hubungan kerja antar karyawan dan management, tetapi termasuk permasalahan sosial yang dialami oleh karyawannya. Eksistensi (keberadaan) lembaga di lingkungan industri masih mendua (berperan ganda). Di satu sisi keberadaan lembaga harus berpihak atau membela kepentingan/kebutuhan karyawan perusahaan. Di sisi lain, lembaga harus dapat berperan untuk membela kepentingan perusahaan, karena anggota kunci yang menduduki posisi dalam lembaga adalah orang yang mempunyai posisi di perusahaan cukup baik (misalnya di devisi Human Resources Developmen/HRD). Lembaga sebagai pengendali untuk meredam gejolak karyawan jika terjadi permasalahan hubungan antara karyawan dengan manajemen (sebagai bumper perusahaan). Itulah sebabnya di Indonesia sulit terjadi gejolak yang luar biasa akibat PHK karena telah terbentuknya floating mass /massa mengambang dari buruh karena lembaga yang dibentuk sebagai wadah organisasi karyawan adalah bentukan perusahaan. Scoot mengatakan bahwa resistensi aktif sangat sulit terjadi karena harus ada organisasi, ideologi dan pemimpin yang kuat serta terbentuknya kesadaran sejati *(true conciousness)*. Dan di Indonesia untuk membentuk resistensi pasif saja sulit karena tidak ada true conciousness tersebut yang ada adalah *false conciousness* (kesadaran palsu) sehingga ketika ada iming-iming tertentu maka akan langsung gampang diredam (Oetami Dewi: 2006).

2.3. Solidaritas Masyarakat

Pengejawantahan dari manusia sebagai makhluk sosial adalah setiap manusia (individu) tidak dapat terlepas dari lingkungan sosial (masyarakat). Dalam tata kehidupan dan penghidupan masyarakat telah terbangun konstruk nilai tentang hidup bersama yang bersumber dari agama maupun adat, yakni adanya gotong royong, tolong menolong. Dalam kondisi normal (sebelum di PHK), mereka

adalah orang yang aktif di lingkungan masyarakat, baik di bidang perkumpulan arisan RT, Keagamaan, olahraga. Mereka cukup dikenal dan saling mengenal di lingkungan masyarakat. Sebagai ilustrasi, dalam pencarian sumber informasi penelitian ini, dengan suka cita masyarakat menunjukkan dan mengantar kebeberapa sumber informasi. Kondisi hubungan sosial yang baik diantara warga masyarakat ini merupakan potensi besar dalam penyebarluasan informasi khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau keterampilan yang dimiliki masing-masing individu. Hasil interaksi di antara anggota masyarakat ini juga tercermin dari bantuan yang diberikan dalam bentuk mendengarkan persoalan/ kesulitan tetangga, pemberian pinjaman, bahkan sampai pada penyaluran tenaga kerja bagi keluarga yang di PHK. Kedekatan hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan dengan tetangga tersebut tercermin dari perhatian tokoh masyarakat yang tergerak hatinya untuk ikut mengatasi masalah PHK. Sebagai ilustrasi tindakan Pak Suparjan (sebagai Guru SMP dan tokoh masyarakat Desa Harjosari) yang menghubungi relasi di Industri Kayu Lapis di Kabupaten Temanggung setelah mengikuti Focus Group Discussion (FGD). Hasilnya, ada kesediaan Industri tersebut untuk merekrut beberapa orang yang diPHK sesuai dengan kriteria yang diajukan.

2.4. Potensi Alam

Selama industrialisasi ini berlangsung, banyak tenaga kerja (muda) yang berada di wilayah ini beralih pekerjaan dari pertanian ke industri, sehingga sektor pertanian semakin banyak berkurang, karena pertanian konvensional (tradisional) tidak segera mendatangkan uang. Ketika industri mengalami krisis bahkan kolap, sektor pertanian dan peternakan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan. Itupun dalam keterpakasaan karena tidak ada alternatif lain, meskipun adanya kelangkaan lingkungan *(environment scarcity)* terhadap lahan pertanian juga merupakan faktor lain banyaknya tenaga muda pertanian yang beralih ke industri.

3. Komitmen pemerintah daerah (kota/ kabupaten) dalam penanganan masalah sosial - ekonomi keluarga pasca PHK.

Penanggulangan masalah Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya telah dijadikan agenda dunia. Kondisi ini tercermin dari konsentrasi beberapa agenda tingkat dunia yang membahas masalah kemiskinan seperti: *World Summit in Social Development* yang menggelar Deklarasi dan Program Aksi untuk Pembangunan Sosial di Copenhagen pada tahun 1995. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan 18-24 April 2005 di Bandung juga menempatkan kemiskinan, pengangguran, dan pengucilan sosial sebagai masalah krusial.

Dalam kerangka penanggulangan masalah sosial kemiskinan keluarga, banyak kebijakan anti kemiskinan yang telah diputuskan oleh Pemerintah, baik melalui program yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada keluarga miskin. Program yang ditujukan secara langsung antara lain, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai jenis program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan dan Program[12] yang secara khusus ditujukan kepada keluarga yang terkena PHK pada dasarnya telah ada sejak tahun 2004. Program anti kemiskinan khususnya yang ditujukan untuk keluarga pasca PHK dari pemerintah ini dapat dilihat dalam Rencara Strategi (Renstra) Departemen Sosial tahun 2005-2010. Konsentrasi sasaran pemberdayaan adalah kemiskinan kronis dan kemiskinan

[12] Dalam model hierarki kebijakan publik ada tiga lapisan kelembagaan yaitu pada (1) level konstitusi (2) level pemerintah, dan (3) level operasional. Sehubungan dengan tiga lapisan kelembagaan dimaksud , juga ada tiga tingkatan kebijakan publik, yaitu: (1) tingkatan kebijakan, (2) tingkatan organisasi (institusi atau aturan main, dan (3) tingkatan implementasi (untuk evaluasi dan umpan balik). Delliarnov, 2009., Ekonomi Politik, Erlangga Jakarta)

sementara yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana sosial (konflik), dan PHK. Implementasi Kebijakan pelayanan kepada masyarakat miskin (kemiskinan sementara) di instansi sosial (Pusat dan Daerah) masih terkonsentrasi pada kemiskinan sementara yang disebabkan oleh bencana alam, yakni pemberdayaan keluarga pasca bencana alam, sedangkan program pelayanan yang ditujukan secara khusus untuk korban PHK. Meskipun tidak menutup kemungkian bahwa sasaran yang terjaring dalam program pemberdayaan adalah keluarga yang diPHK. Sebagai ilustrasi, Dinsonakertran Kabupaten Semarang merealisasikan dana pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari cukai rokok, yakni pajak yang dibebankan kepada masyarakat perokok. Pemberian stimulan berupa peralatan untuk pengembangan usaha keluarga dari Dinas Perindustrian.

Penanganan korban PHK di Kementerian Sosial melekat pada program pemberdayaan fakir miskin. Jika dicermati, program ini tentunya kurang sesuai. Alasannya, kondisi fakir miskin dengan korban PHK tentunya tidak sama. Korban PHK mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan pengalaman dalam bidang pekerjaannya. Jika dilihat dari penghasilannya, baik fakir miskin maupun korban PHK mungkin tidak ada perbedaan, atau bahkan korban PHK beberapa saat memperoleh hasil Nol rupiah. Tetapi aset dan akses yang dimiliki oleh Korban PHK pasti akan berbeda.

Dalam kerangka penanganan kasus PHK, Dinas Transmigrasi lebih bersifat menjembatani dan atau memfasilitasi perundingan antara Perusahaan dan Karyawan selama proses PHK. Program yang ditujukan secara khusus untuk pmberdayaan Komitmen Pemerintah Daerah Cq Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memang belum ada, tetapi ada program yang berkaitan dalam pengembangan ketrampilan. Di beberapa Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), Dinas Sosial telah digabung dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Salah satu keuntungan dari penggabungan kedua lembaga tersebut adalah penanganan masalah sosial keluarga pasca PHK lebih terkonsentrasi dan dapat menghindari terjadinya overlaping.

Salah satu klausul tentang pesangon perusahaan/industri bagi tenaga kerja yang di PHK dalam Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah berdampak pada perekrutan tenaga kerja melalui lembaga Outsourching, bahkan pemanfaatan lembaga ini tidak hanya pada pemanfaatan tenaga level menengah ke bawah di perindustrian, tetapi sudah merambah pada lembaga Perbankan. Di satu sisi, Pemanfaatan tenaga kerja dari lembaga *outsourcing* ini merupakan salah satu strategi yang ditempuh perusahaan/ industri untuk menghindarkan diri dari jeratan uang pesangon yang harus diberikan kepada karyawan yang di PHK. Di sisi lain, kondisi ini akan memperlemah posisi tawar menawar tenaga kerja.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang mewajibkan setiap PT untuk melaksanakan *Coorporate Social Responcibility* (CSR) atau dalam terminologi lokal disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha[13]. Realisasi CSR

[13] Pentingnya tanggung jawab sosial tersebut Jorgensen, Gilbert & Harry (1981: 351):" dalam Mujiyadi dkk, mengemukakan Today, *People in business, the social work profession, industry, labor an government are beginning to acknowledge that only significantly increased productivity will enhandce the nation, ability to provide housing for the poor, jobs for the minorities, medical care for the aged, and a better standard of living for all".* Sonny Keraf (1991) juga mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial dunia usaha terhadap relasi sekunder bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atas masalah-masalah sosial seperti: lapangan pekerjaan, pendidikan, prasarana sosial, pajak dan sebagainya. Dari segi tuntutan bisnis dan tuntutan etis, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu tuntutan yang semakin dirasakan relevansinya dalam operasi bisnis modern, hanya saja pelaksanaan konkritnya diserahkan kepada setiap pelaku bisnis sesuai dengan situasi yang dihadapinya.

Hasil penelitian Mujiyadi dkk. Menunjukkan bahwa Bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis secara bertingkat sebagai berikut: (1) Pengalokasian dana untuk kegiatan sosial yang bersifat insidental (2) Kegiatan sosial dan dukungan dana yang berifat insidental (3) Penganggaran dana untuk kegiatan sosial yang bersifat rutin (dimasukkan dalam bagian manajemen industri); (4) Kegiatan sosial dan dukungan dana yang bersifat rutin (masuk dalam bagian manajemen industri) (5) Membentuk lembaga yang secara khusus untuk melaksanakan pembangunan sosial yang mereka beri nama Community Development (CD).

mempunyai keterkaitan dengan realisasi kewajiban dari penyisihan dana 1% keuntungan perusahaan/industri untuk pembanguan sosial. Dalam kerangka pelaksanaan CSR tersebut, beberapa perusahaan/industri besar telah membentuk Unit yang secara khusus disebut Unit Community Developmet (Unit CD). Umumnya, pengelola CD adalah karyawan, sehingga realisasi dari kegiatan CD lebih banyak bersifat karitatif.

III. PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Keluarga cukup arif dalam menyikapi permasalahan ekonomi keluarga yang sedang bergejolak. Walaupun satu peran (ekonomi) sedang terganggu, dan secara psikologis mendapat tekanan, tetapi mereka masih menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara wajar. Mereka masih mampu meredam gejolak dan tekanan dalam diri seorang ayah maupun ibu. Apapun keputusan yang ditentukan oleh keluarga akan selalu dihadapkan pada konsekuensi dan resiko. Kemampuan mereka dalam menghadapi gejolak ekonomi tersebut tidak terlepas dari harmoni lingkungan sosial yang telah mereka bangun (keluarga besar/ kerabat, masyarakat di permukimannya, dan lingkungan teman sekerja). Lingkungan sosial telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengatasi masalah keluarga, namun pertanyaannya adalah sampai kapan mereka terus mensuport keluarga yang di PHK.

Potensi untuk penanganan masalah sosial ekonomi keluarga pasca PHK (baik alam, Industri dan kemasyarakatan) masih tersedia cukup besar. Sumber daya alam yang tersedia masih memungkinkan untuk menampung dan membutuhkan tenaga. Di setiap daerah yang dijadikan sebagai sentra dan Zona industri, umumnya tidak terbatas pada satu industri yang memproduksi satu produk, tetapi di wilayah tersebut juga dikembangkan industri yang produksinya cukup variatif. Hubungan baik (hasil interaksi) di antara anggota masyarakat merupakan modal sosial dalam mengatasi permasalahan keluarga.

Program anti kemiskinan di lingkungan instansi sektor di daerah (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) yang secara khusus menunjuk pada keluarga Pasca PHK belum tampak jelas. Program yang ditujukan kepada keluarga miskin memang sudah cukup banyak dan sasaran program tersebut dapat berasal dari keluarga yang di PHK. Jika pelayanan kepada masyarakat dengan program yang tidak diperuntukkan secara khusus pada masalah masyarakat tersebut, maka jumlah sasaran yang terjaring sangat sedikit dibanding dengan jumlah peyandang masalah (tidak efisien). Sementara itu Program anti kemiskinan baik dari pemerintah maupun berasal dari Industri (CSR) masih berjalan sendiri sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.

1.2 Rekomendasi

Tenaga kerja yang di PHK merupakan sumber daya manusia yang potensial. Mereka adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dan pengalaman kerja yang cukup. Program pelayanan yang seharusnya diperlukan adalah program pemberdayaan sosial bagi keluarga pasca PHK. Oleh karena itu, pelayanan kepada korban PHK sebaiknya diberikan tempat tersendiri dan terpisah dengan program penanganan Fakir Miskin.

Dalam kerangka penanganan permasalahan sosial keluarga pasca PHK ada tiga kekuatan besar yang terdiri dari Pemerintah *(public sector)*, Dunia Usaha/industri *(privat sector)*, dan kelompok dalam masyarakat *(collective action sector)*. Ketiga sektor tersebut pada dasarnya telah mempunyai program yang berkaitan dengan penanganan masalah pengangguran atau peningkatan tenaga potensial, namun ketiga sektor tersebut masih berjalan secara terpisah (ego sektoral)

sesuai dengan kepentingan masing-masing sektor. Dalam kerangka optimalisasi hasil pelayanan, maka langkah awal yang diperlukan adalah membangun kesamaan persepsi masing-masing sektor, siapa melakukan apa, kapan pelaksanaannya, di mana dilaksanakan sesuai peran dan fungsi masing-masing sektor.

STRATEGI PEMBERDAYAAN KELUARGA PASCA PHK

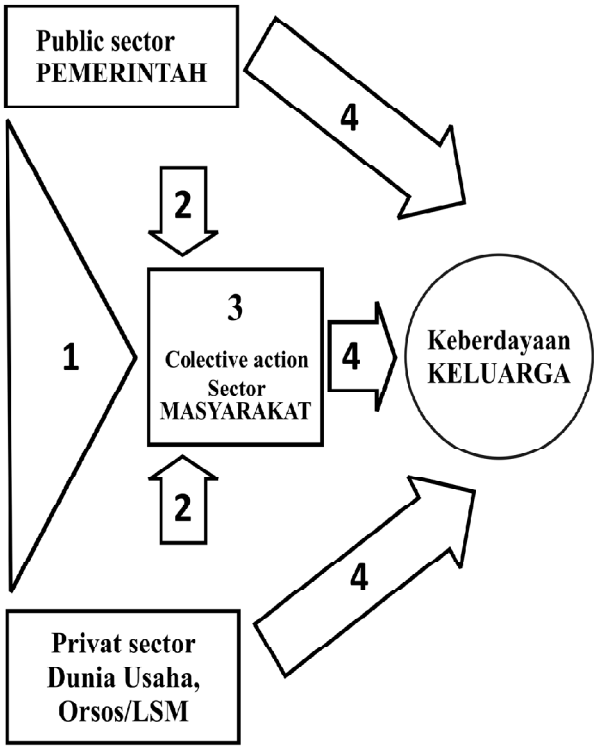

Keterangan:

1. Persamaan persepsi: Public sector, Privat sector dan Collectif action sector merupakan tiga serangkai (threepartide) dalam menghadapi berbagai permasalahan. Ketiga unsur tersebut harus mempunyai (1) kesamaan persepsi tentang PHK dan upaya penanggulangannya, (2) kesadaran terhadap peran dan fungsi masing masing sektor.
2. Penguatan Potensi kepada masyarakat (keluarga) agar lebih mampu dalam menghadapi goncangan ekonomi.
3. Pengorganisasian masyarakat.
4. Kemitraan dari ketiga unsur akan menjadi suatu kekuatan besar dalam peningkatan keberdayaan keluarga

***

DAFTAR BACAAN

Badan Pusat Statistik, 2008., *Profil Kemiskinan di Indonesia 2008*. Jakarta.

Darwin, M. Muhadjir (2005); *Memanusiakan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan, Benang Merah,* Yogyakarta.

Delliarnov, 2009., *Ekonomi Politik,* Erlangga Jakarta.

Departemen Sosial RI, 2005., *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan: Program Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2006-2010*. Jakarta.

Dewi Oetami, 2006, Resistensi Monografi, Sosiologi UI Press, Jakarta.

Effendi Nur Tajudin (2000), *Pembangunan, Krisis, dan Arah Reformasi ,* Muhammadiyah Univercity Press, Yogyakarta.

Harahap Khomarudin (1985) *Sosiologi Keluarga,* Nur Cahaya Jakarta.

Horton, B. Paul & Chester, Hunt. L.,1984, *Sosiologi: Jilid I, edisi ke 6;* Terjemahan: Aminuddin Ram dan Tita Sobar; Erlangga, Jakarta.

Jalaludin, Rakhmat, 1999.,*Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi, Remaja Rosda Kaya,* Bandung

Keraf, Sonny (1991). Etika Bisnis, *Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur,* Kanisius, Yogyakarta.

Mujiadi, B dan Gunawan (2002). *Pengaruh Tanggung Jawab Industri Terhadap Sikap Masyarakat Atas Keberadaan Industri,* Departemen Sosial Jakarta.

Soekanto, S. (1995), *Sosiologi Suatu Pengantar,* Rajawali, Jakarta.

Soetomo, 2006.,*Strategi Strategi Pembangunan masyarakat,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Suharto, Edi. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial & Kebijakan Sosial: Spektrum pemikiran,* LSP-STKS, Bandung.

Sumodiningrat, Gunawan (2007) *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia,* Kompas Media Nusantara, Jakarta

Prijombodo, Bambang, 2009, *Perlu Langkah Cepat dan Terarah*, Kompas Jumat 6 Februari 2009

Goode, J. William, 1985. *Sosiologi Keluarga,* Bina Aksara Jakarta

Heni Rahayu, 2009., Malaysia Memulangkan 100 ribu TKI Tahun Ini, dalam Media Indonesia 5 Februari 2009

Rini Widuri Ragillia, 2009, Proteksi Pasar Jangan Setengah Hati, Media Indonesia, Kamis 19 Februari 2009.

Zubaedah Hanum, 2009. *Krisis Picu Kerawanan Sosial, Dana Stimulus Capai Rp 500 Triliun,* dalam Media Indonesia 4 Februari 2009

Yuni Suwarto dan Aris Santoso (1995), *Ekonomi Rakyat Antara Gagasan dan Realita,* Sekretariat Bina Desa/INDRRA, Jakarta.

http://BPS.go.id.

http://www.kontan.co.id.

http://mediadata.co.id.

http://groups.yahoo.com/group/nasional-list/message

http://www.matabumi.com.

http://detikislam.com

http://mediadata.co.id.

http://www.portalhr.co.

http://www.kapanlagi.com.

http://bandungkab.go.id